

## **ABSTRAK**

*Studi ini bertujuan untuk mengetahui peran KPU Kabupaten Klaten dalam peningkatan partisipasi penyandang tuna netra dalam pilkada tahun 2015. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Bagaimana peran KPU Kabupaten Klaten untuk meningkatkan partisipasi penyandang tuna netra dalam pilkada 2015?; Apa saja faktor kendala dalam meningkatkan partisipasi penyandang tuna netra saat pilkada?. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum empiris. Suatu metode penelitian yang menekankan pada pelaksanaan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan kemudian dihubungkan dengan kenyataan mengenai peran KPU Kabupaten Klaten dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015. Hasil studi ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan KPU Kabupaten Klaten sudah sangat baik, melakukan sosialisasi kepada paguyuban penyandang disabilitas, namun informasi yang telah disampaikan dalam sosialisasi tersebut banyak yang tidak tersampaikan kepada penyandang disabilitas yang tempat tinggalnya jauh dari kota, dikarenakan minimnya anggaran yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Klaten, sehingga sosialisasi yang dilakukan menjadi kurang maksimal; Kendala-kendala yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Klaten yaitu kurangnya kesadaran dari penyandang disabilitas dan lokasi TPS yang mungkin bisa dikatakan sulit untuk dilalui oleh penyandang disabilitas dari rumah, karena lokasi Kabupaten Klaten termasuk dalam lereng gunung Merapi sehingga daerah pelosok tidak memiliki tanah yang rata, sehingga sulit jika penyandang disabilitas khususnya tuna netra untuk menjangkau TPS sendiri tanpa ditemani oleh saudara atau tetangga. Penelitian ini merekomendasikan bahwa KPU Kabupaten Klaten sebaiknya melakukan koordinasi secara berkesinambungan kepada PPK dan PPS maupun kepada organisasi penyandang disabilitas dalam hal pendataan pemilih penyandang disabilitas, agar kebutuhan pemilih penyandang disabilitas dapat terpenuhi melalui penyediaan prosedur dan fasilitas yang berspektif disabilitas; Pelaksanaan sosialisasi pemilu khususnya bagi penyandang disabilitas tidak hanya dilakukan pada kelompok-kelompok penyandang disabilitas, KPU Kabupaten Klaten dapat meminta bantuan kepada KPPS untuk melaksanakan sosialisasi agar pemilih penyandang disabilitas yang tidak masuk ke dalam kelompok tetap mendapatkan sosialisasi pemilu dengan harapan akan menciptakan pemilih-pemilih yang cerdas. Selain itu pelaksanaan sosialisasi seharusnya tidak hanya dilakukan sekali dan saat menjelang pemilu saja; Pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek) pemilu bagi KPPS benar-benar diupayakan secara optimal, agar petugas KPPS dapat memahami keberadaan penyandang disabilitas dan menyediakan kebutuhan pemilih penyandang disabilitas di TPS.*

*Kata Kunci: KPU Kabupaten Klaten, Pemilu, Disabilitas*